

**WISATA PERDESAAN:
PELESTARIAN BUDAYA DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

***RURAL TOURISM:
CULTURE PRESERVATION AND IMPROVING VILLAGE
COMMUNITY WELFARE***

Roby Ardiwidjaja

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Kementerian Pariwisata,
Jl. Merdeka Barat No. 17 Indonesia
r_ardiwidjaja@yahoo.com

Abstract

Indonesia has a natural and cultural resources biodiversity as attractiveness assets that are largely scattered in rural areas including in the remote and coastal areas. It is stated the population of Indonesia as much as approximately 250 million people that scattered in 99 towns and, more than 78 thousands of villages. It shows that the characteristics of country is rural, with it's diversity for more than 500 tribes, where generally the community still keep, conduct and develop the tradition and culture as their identity. Since associated with tourism development, the effort of this identity conservation is supposed to become tourist attraction that reflects the authentically unique of Indonesia. Unfortunately the potential diversity of cultural roots in rural areas, has not been able to be managed properly and correctly as a tourist attraction and activities. Through library research, the article purpose is to fegure out that implementing rural tourism can be one innovative solution to improve rural communities well-being, as well as to support Nawacita programs. Finally, the strategic recommendations in this article state that the tourism development in rural areas should be sosially accepted, culturally appropriate, undiscriminative, people centered (pro-poor; job, growth), and environmentally sound.

Keywords: *tourism, rural, rural tourism, cultural roots, Indonesianness.*

Abstrak

Indonesia memiliki aset daya tarik keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang sebagian besar tersebar di daerah pedesaan, pedalaman dan pesisir. Disebutkan bahwa populasi penduduk Indonesia sebanyak kurang lebih 250 juta orang, tersebar di 99 kota dan di lebih 78 ribu desa. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan tipe negara pedesaan, dengan keanekaragaman lebih dari 500 suku bangsa, yang masyarakatnya masih tetap menjaga, mengembangkan dan melaksanakan tradisi sebagai identitasnya. Ketika dikaitkan dengan pariwisata, seharusnya upaya pelestarian identitas tersebut menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan keunikan yang otentik ke Indonesiaan. Namun potensi keragaman akar budaya di wilayah pedesaan, tidak mampu di kelola secara optimal sebagai atraksi dan aktivitas wisata. Melalui studi kepustakaan, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahwa penyelenggaraan wisata pedesaan dapat menjadi satu solusi inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sekaligus mendukung program Nawacita. Rekomendasi yang diusulkan dalam tulisan ini adalah bahwa pembangunan pariwisata di kawasan pedesaan harus dapat diterima dalam kehidupan sosial dan layak secara budaya setempat, tidak diskriminatif, orientasi pada masyarakat lokal, dan mampu menjaga lingkungan.

Kata kunci: *pariwisata, desa, wisata pedesaan, akar budaya, ke indonesiaan.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi, John Naisbitt (1994) seorang futuris menguraikan dalam bukunya *Global Paradox* bahwa pada saat ini dunia menguraikan batas-batas negara menjadi negara yang nyaris *borderless*. Dampak langsung globalisasi tersebut sudah mencairkan batas-batas geopolitik suatu negara hingga membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pariwisata. Secara gradual perubahan di Indonesia juga ditandai oleh internalisasi paham global, seperti universalisme, humanisme, liberalisme, ideologi politik, sistem ekonomi, dan ekologi. Pesatnya perkembangan teknologi di era informasi yang memudahkan orang mendapatkan informasi dari luar ini merupakan pemicu tumbuh suburnya doktrin-doktrin barat masuk ke tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dikhawatirkan akan menyebabkan pelemahan kebhinekatunggalikaan dan karakter bangsa. Semakin bergesernya nilai identitas budaya dalam kehidupan berbangsa. Hal ini diperparah lagi dengan timbulnya berbagai konflik kepentingan, perbedaan ideologi, ketidakseimbangan eksploitasi ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan. Paling ekstrim adalah semakin lemahnya ketahanan nasional yang sangat berpengaruh terhadap disintegrasi bangsa sebagai akibat pengaruh interaksi antar budaya yang salah satunya melalui penyelenggaraan pariwisata.

Pesatnya perkembangan pariwisata menunjukkan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Indikator paling kentara adalah peningkatan mobilitas manusia secara masal dengan keinginan mengetahui sesuatu pada tempat, lingkungan dan suasana yang baru, guna memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru. Perkembangan pariwisata ke depan, akan

semakin bertambah kompleks karena pengaruh berbagai isu strategis antara lain munculnya kompetitor-kompetitor dari luar. Permintaan wisatawan terhadap produk wisata yang lebih berkualitas dan mengacu pada lingkungan dan kesinambungan; serta kesadaran mengoptimalkan potensi kepariwisataan di daerah melalui paradigma keberlanjutan dalam sebuah rangkaian kegiatan pariwisata (Luigi 2004).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan tetap memberi perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya dan lingkungan. Selanjutnya bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, memupuk rasa cinta tanah air dan memperkaya kebudayaan nasional, serta memperkuat identitas jati diri bangsa dalam mempererat persahabatan antar bangsa.

Bisa dibayangkan, penduduk Indonesia berjumlah sekitar dari 250 juta jiwa lebih tersebar di lebih dari 78 ribu desa di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat budayanya, menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan budaya ke Indonesiaan seperti tinggalan Cagar budaya serta adat istiadat, kearifan lokal, tradisi dengan 742 bahasa dan dialek dari 1.128 suku bangsa (Rus Khan, 2007). Keanekaragaman suku bangsa dengan budayanya tersebut yang tersebar di sebagian besar daerah terpencil (*remote areas*) dan daerah pedesaan (*rural area*). Pada dasarnya merupakan aset strategis yang harus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mampu memberikan

kesejahteraan. Namun juga memberikan nilai tambah antara lain dari aspek ekologis, edukatif, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomis yang bermanfaat bagi bangsa ini. Khususnya masyarakat di perdesaan.

Menurut laporan tahunan statistik Indonesia yang diterbitkan BPS (2011), jumlah desa di Indonesia sekitar 78.000 desa yang terletak di lembah, lereng dan hamparan. Menurut Tempo (2013) sebagian besar desa atau sekitar 72.600 desa tergolong katagori desa miskin. Hal tersebut dikarenakan kondisi tingkat produktivitas dan tingkat pendidikan, keterampilan, taraf kehidupan ekonomi, kesehatan ketersediaan lapangan pekerjaan belum memadai, serta infrastruktur sosial yang juga masih sangat minim (Arndt, 1988). Fakta tersebut tentunya menjadi isu strategis yang perlu dipecahkan dalam mendukung program pembangunan pariwisata yang akan datang. Keanekaragaman daya tarik aset bangsa yang sebagian besar berada di kawasan terpencil dan perdesaan menjadi penting untuk dijadikan dasar dalam menentukan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap arah pembangunan pariwisata. Sekaligus sebagai alat dalam mendukung program pelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sosial, pengentasan kemiskinan serta memperkuat identitas dan jati diri bangsa.

Artikel ini berupaya menguraikan gambaran tentang permasalahan dan peluang pentingnya keanekaragaman daya tarik khususnya budaya beserta lingkungannya sebagai aset bangsa, yang sebagian besar berada di kawasan terpencil dan perdesaan. Melalui pariwisata, diharapkan mampu dikembangkan menjadi destinasi tujuan wisata yang unik dan otentik ke Indonesiaan. Sekaligus mewujudkan pariwisata perdesaan sebagai konsep geostrategi percepatan pembangunan nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Penulisan artikel akan memahami lebih dalam fenomena perdesaan sebagai daya tarik wisata berbasis identitas ke Indonesiaan. Metode yang digunakan adalah historis bibliografis, yaitu kajian pustaka (*desk research*) dengan langkah kerja menghimpun, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi data dan informasi kepustakaan yang terkumpul. Kajian kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji dengan mengandalkan ketersediaan literatur terkini dan hasil penelitian. Khususnya yang terkait dengan pariwisata berkelanjutan, sumber daya tarik budaya, serta wisata perdesaan (Mill dan Morrison, 2012). Data dan informasi kepustakaan dalam bentuk cetak atau elektronik dapat berupa sumber primer seperti buku harian (*autobiography*), laporan penelitian, dan hasil wawancara. Sumber sekunder berupa tulisan tentang penelitian, tinjauan, ringkasan, kritikan, ensiklopedi, kamus, dan buku pegangan.

PEMBAHASAN

Di era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi. Dampak langsung globalisasi yang mencairkan batas-batas geopolitik suatu negara Termasuk Indonesia, telah nyata membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi *gap* pembangunan infrastruktur sosial antar kota dengan desa yang semakin lebar. Tumbuh suburnya budaya materialisme dan individualisme tanpa memperdulikan nilai dan norma yang ada. Berdampak besar terhadap melemahnya kepedulian dan apresiasi terhadap penguatan budaya dan jati diri bangsa. Terbukti bentuk manifestasi kebudayaan kita berupa batik, reog Ponorogo, angklung dan puluhan lainnya diakui oleh bangsa lain seperti Negara jiran, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pengaruh globalisasi ini juga membawa perubahan paradigma dan tren pariwisata global.

Perubahan tersebut memengaruhi motivasi wisatawan bukan lagi melulu pada hiburan dan kesenangan. Tetapi cenderung pada kepuasan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang unik dan otentik Gray (1970) dalam Hall (2003). Namun fakta lapangan memperlihatkan bahwa permasalahan pariwisata saat ini:

1. Masih diposisikan sebatas mesin ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam dan budaya tanpa memperhatikan manfaat nilai tambah terkait aspek lingkungan, sosial budaya, pendidikan dan estetika di berbagai daerah tujuan wisata
2. Pembangunan pariwisata khususnya di kawasan perdesaan belum optimal, serta tidak berbasis pada kehidupan sosial dan akar budaya keseharian masyarakat setempat.
3. Belum adanya konsep jelas terkait arah pembangunan pariwisata Indonesia ke depan yang mampu mencerminkan keunikan dan keaslian daya tarik ke-Indonesiaan.

Tinjauan

Untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap berbagai hal terkait dengan pengembangan pariwisata perdesaan, berikut beberapa konsep dan terminologi:

1. Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia melakukan perjalanan yang bersifat sementara, dengan tujuan mendapat pengalaman baru. Menurut Gunn (1998), esensi pariwisata adalah ekonomisasi pengalaman dan pengetahuan dari daya tarik atau atraksi yang unik dan berbeda. Keunikan dimaksud yang umumnya sebagian besar daya tarik tersebut tersebar di *remot* atau *rural area*, hanya dapat diperoleh dari keanekaragaman potensi sumber daya tarik budaya serta alam bersifat langka atau endemik (Inskeep 1991). Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 (Pasal 1), definisi pariwisata

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

2. Pariwisata berkelanjutan. *World Tourism Organization* (WTO, 2006, 2-6) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan dan tuan rumah, sekaligus melindungi dan meningkatkan peluang di masa depan dengan memperhatikan kepuasan wisatawan, penggunaan sumber daya lingkungan secara optimal, menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, memberikan manfaat sosial ekonomi bagi semua *stakeholder*, memonitor dampak, serta partisipasi informasi dari semua pihak terkait, serta kepemimpinan politik yang kuat.
3. Pariwisata Budaya. Pariwisata budaya sebagai suatu *konsep* bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian budaya, terkait non bendawi (*intangible culture*) dan budaya bendawi (*tangible culture*), beserta lingkungannya.
4. Pelestarian tidak semata berhubungan dengan kegiatan konservasi lingkungan alam serta pemugaran bangunan atau perawatan naskah-naskah kuno saja. Pelestarian mencakup upaya-upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya beserta lingkungannya. Pelestarian sumber daya alam dan budaya adalah upaya untuk memberi makna baru bagi sumber daya tersebut. Apakah untuk kepentingan lingkungan, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial budaya, rekreatif atau untuk kepentingan estetika.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Wijaya, 2002). Koentjaraningrat (1977) mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu daerah yang mata pencahariannya sebagian besar dari bertani. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Tabel 1. Jumlah Daerah Administrasi di Indonesia Tahun 2011

PROVINSI	JUMLAH			
	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Sumatera	117	34	1.836	24.246
Jawa	84	34	2.136	25.225
Bali, Nusa Tenggara	36	4	463	4.688
Kalimantan	46	9	591	6.958
Sulawesi	62	11	961	10.006
Maluku & Papua	54	6	760	7.075
TOTAL/Indonesia	399	98	6.747	78.198

Sumber: Hasil Pemutakhiran *Master File* Desa Semester I. BPS

Kondisi Penyelenggaraan Wisata Perdesaan

Arah pembangunan kepariwisataan saat ini telah mengalami pergeseran ke arah pariwisata yang berbasis berkelanjutan dan bersandar kepada ekonomi berbasis kerakyatan yang menekankan penggalangan kekuatan komunitas dalam pemeliharaan lingkungan baik alam maupun budaya (Robby Ardiwidjaja, 2013). Namun pembangunan kepariwisataan nasional masih menunjukkan sifat sentralistik. Seharusnya perencanaan pembangunan kepariwisataan menunjukkan proses perencanaan yang mandiri (Cooper, 2012), terutama pada kawasan perdesaan di daerah.

Adanya berbagai pengaruh penting baik dalam maupun luar negeri tentunya selain menjadi tantangan juga akan menjadi peluang bagi Indonesia. Pertama pengaruh yang menjadi tantangan, yang perlu dicari jalan keluarnya dalam mempercepat pembangunan pariwisata nasional. Khususnya wisata perdesaan, antara lain:

1. Pelaksanaan otonomi daerah. Diyakini akan mendorong daerah lebih mandiri untuk mengurus dan mengontrol daerahnya sendiri dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik termasuk dalam pengelolaan pariwisata daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata di perdesaan, kebijakan otonomi dan desa memberikan kesempatan pada desa untuk mandiri menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berkelanjutan.
2. Kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik nasional.
3. Pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran bukan sekedar masalah statistik atau angka, tetapi persoalan fakta yang menggambarkan kondisi sulitnya kehidupan serta kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2011), penduduk Indonesia tersebar di 98 kota dan 78.198 desa, sekitar 72.600 desa tergolong katagori desa miskin menurut *International Fund for Agricultural Development* (Tempo, 2013; BPS, 2012)
4. Degradasi lingkungan dan budaya sebagai Identitas Bangsa. Globalisasi telah membuka peluang terjadinya proses akulturasi yang apabila menghasilkan dominasi kebudayaan asing akan menyebabkan pendangkalan

budaya yang dapat menghancurkan budaya-budaya lokal serta berdampak hilangnya jati diri suatu bangsa atau etnik.

5. Konflik antar daerah, antar etnis dan antar sektor. Keanekaragaman potensi alam serta keanekaragaman budaya yang mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, Untuk menjaga kesatuan dalam kemajemukan tersebut dibutuhkan keserasian sosial di tengah masyarakat agar tidak timbul friksi atau konflik antar etnis yang seringkali merembet pada konflik kepentingan antar daerah maupun lembaga.
6. Posisi pariwisata berkelanjutan dalam pembangunan nasional. Pariwisata sebagai bagian integral pembangunan nasional. Seringkali menimbulkan masalah multi dimensi karena belum diposisikan sebagai alat. Konsep pendekatan yang seharusnya mampu mendukung pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan dalam pelestarian sosial dan akar budaya keseharian masyarakatnya, peningkatan pendapatan, peningkatan ilmu pengetahuan, pengentasan pengangguran dan kemiskinan, konservasi lingkungan alam, penguatan jati diri dan karakter budaya bangsa, serta penguatan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Kemudian pengaruh yang menjadikan peluang bagi Indonesia adalah keanekaragaman daya tarik potensi sumber daya alam dan budaya sebagai atraksi wisata yang sebagian besar terletak di daerah perdesaan (*Rural/remote area*) dan tersebar di ribuan pulau. Keanekaragaman kultur masyarakat yang tersebar tersebut sangat berpeluang besar menjadikan Indonesia sebagai satu negara kepulauan terbesar di dunia yang akar pembangunan dan pendapatan utama ekonomi negaranya adalah pada keanekaragaman kekayaan khususnya yang berada di daerah perdesaan, pesisir dan di wilayah perairan.

Frochot (2005) Pesonen et al, (2011) menjelaskan tentang karakteristik pariwisata

perdesaan, dibangun di atas kekhususan alam perdesaan berupa ruang terbuka dan tradisi khas perdesaan tersebut. Juga menyatakan bahwa pariwisata perdesaan dikembangkan dalam skala perdesaan yang mengacu pada usaha wisata skala kecil serta merepresentasikan kompleksitas dunia perdesaan seperti lingkungan, ekonomi, sejarah, dan lokasi.

Menurut Eurostat (1998), Pariwisata perdesaan dapat didefinisikan:

The activities of a person travelling and staying in rural areas (without mass tourism) other than those of their usual environment for less than one consecutive year for leisure, business and other purposes (excluding the exercise of an activity remunerated from within the place visited)

Dari terminologi tersebut, maka pada saat mengemas produk wisata perdesaan akan selalu mengacu tidak hanya pada konsep budaya saja. Tetapi juga harus dilihat secara holistik lingkungan baik alam maupun budaya serta hubungannya antara satu konsep dengan konsep yang lain. Gambar berikut dapat memperlihatkan bagaimana konsep wisata perdesaan memiliki keterkaitan dengan konsep wisata lain.



Gambar 1. Pasar Produk Wisata

Oleh karenanya pendekatan pariwisata berkelanjutan melalui konsep pariwisata perdesaan. Bagaimanapun juga seharusnya dapat menjadi peluang strategis pengelolaan

keanekaragaman potensi daya tarik sumberdaya alam dan budaya dalam mendukung percepatan pembangunan nasional yang dimulai dari pinggir. Hal ini mengingat:

1. Kekayaan keanekaragaman daya tarik yang unik dari kehidupan masyarakat dan lingkungan kawasan perdesaan dan sekitarnya. Sumber daya tarik tersebut, hampir seluruhnya masih dalam kondisi asli dan alami *Indonesia The Authentically Unique*.
2. Pariwisata di era globalisasi saat ini sudah diposisikan sebagai alat, konsep, cara atau pendekatan untuk konservasi lingkungan; melestarikan budaya, mengentaskan kemiskinan, membuka peluang kerja dan usaha, meningkatkan pemahaman dan apresiasi silang budaya; serta memperkuat ketahanan dan pertahanan bangsa.
3. Perubahan paradigma dan arah pariwisata global telah bergeser ke arah pariwisata berkelanjutan yang menempatkan masyarakat setempat sebagai sumber dalam memberikan kepuasan pada wisatawan (*special interest/niche market*) dalam perolehan pengetahuan dan pengalaman (Page, Getz, 1997; Cooper et.all, 1996)
4. Berlakunya perundang-undangan otonomi daerah di desa, memberi peluang dan kesempatan pada desa untuk mewujudkan aspirasi strategi pengembangan yang bercirikan kepada karakter sumber daya pariwisata yang dimilikinya secara otonom.

Strategi Pengembangan

Pengembangan kawasan perdesaan sebagai destinasi wisata adalah satu bentuk pengelolaan keanekaragaman daya tarik ke Indonesiaan. Sekaligus upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya, penguatan kehidupan sosial dalam kesehariannya, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui terbukanya kesempatan usaha dan peluang kerja.

Prinsip Pembangunan Pariwisata Perdesaan

Menurut Ardiwidjaja (2013) pembangunan bidang apapun termasuk bidang pariwisata khususnya di kawasan perdesaan harus:

1. Secara sosial dapat diterima (*Socially accepted*). Pembangunan kawasan perdesaan intinya bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dari kebutuhan fisik sampai sosial budaya. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan pariwisata perdesaan pada dasarnya tidak hanya diukur dari frekwensi atau banyaknya kegiatan pariwisata yang dilakukan. Tetapi yang lebih penting lagi dapat diterima dalam kehidupan keseharian masyarakatnya secara berkelanjutan.
2. Layak secara budaya setempat (*Culturally appropriate*). Pengembangan pariwisata perdesaan harus mengacu juga pada norma dan nilai yang berlaku pada akar budaya masyarakatnya. Penyelenggaraan pariwisata di perdesaan memiliki prinsip harus mampu menginterpretasi nilai makna penting berbagai aspek tradisi dan budaya yang ada dikawasan perdesaan. Hal ini sebagai daya tarik dan sumber inspirasi dalam memperkuat akar budaya masyarakat setempat.
3. Fokus pada masyarakat (*People centred*). Pembangunan pariwisata perdesaan menekankan pada pendekatan dari, oleh, untuk masyarakat. Masyarakat perdesaan sebagai motor penggerak yang didampingi pengelola, berperan penuh berdasarkan ide dari masyarakat melalui dorongan dari pemerintah, sekaligus menjadi pusat penerima manfaat.
4. Tidak diskriminatif (*Indiscriminative*). Karena sifatnya yang multi disiplin dan multi sektor, pembangunan pariwisata perdesaan yang tumbuh dari, oleh dan untuk

kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya merupakan *priority integrated tools* yang mampu memberi keseimbangan, pemerataan, dan kesetaraan dalam pelibatan membangun pilar penguatan akar budaya serta pelestarian lingkungan kawasan perdesaan sebagai destinasi wisata perdesaan.

5. Ramah lingkungan (*Environmentally sound*). Perlindungan kawasan perdesaan dan lingkungan sekitarnya merupakan suatu keniscayaan untuk menyelenggarakan pariwisata dapat berjalan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, pariwisata dapat menjadi alat pengelolaan terpadu lingkungan kawasan perdesaan secara berkelanjutan, dengan mengemas mulai dari atraksi, akomodasi, transportasi, kerajinan tangan, kesenian hingga kuliner yang ramah lingkungan berbasis lebih pada kelokalan.

Pemetaan dan Penilaian

Pengembangan kawasan perdesaan sebagai destinasi tujuan wisata perdesaan yang berkelanjutan, adalah penting untuk terlebih dahulu melakukan pemetaan (*mapping*) dan penilaian (*assessment*) terhadap berbagai aspek meliputi:

1. Aspek Lingkungan Alam dan budaya. Kawasan perdesaan yang memiliki daya tarik keanekaragaman potensi alam berupa flora, fauna, ekosistem, dan fenomena alam, merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang dengan tradisi dan kearifan lokalnya telah menyesuaikan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut secara turun temurun. Membangun kawasan perdesaan sebagai destinasi wisata, bukan berarti menjadikan seluruh potensi yang ada sebagai komoditi, namun lebih jauh lagi menjadikan nilai dan keberadaan potensi dimaksud tetap lestari. Penilaian secara holistik seperti ini dipastikan mampu menjadikan kawasan

perdesaan sebagai destinasi wisata yang terpadu dan berkelanjutan (MacKinnon, Child dan Thorsell, 1990).

2. Aspek kehidupan Sosial Budaya. Masyarakat desa merupakan komunitas yang bersifat otonom dan terus mempertahankan tradisinya serta akar budaya kehidupan keseharian dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kondisi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai tipe negara perdesaan yang memiliki aset keanekaragaman kekayaan warisan budaya, tercermin dari keanekaragaman pola hidup, tradisi dan benda warisan budaya. Aset tersebut bagi masyarakat memiliki nilai strategis sebagai identitas peradaban bangsa Indonesia, sekaligus juga memiliki nilai keunikan sebagai daya tarik wisata ke Indonesiaan.
3. Aspek edukasi melalui interpretasi (*Story Telling*). Kawasan perdesaan dengan sistem lingkungan alam serta hubungannya dengan tradisi dan kehidupan budaya keseharian masyarakatnya. Hal ini merupakan suatu kapsul edukasi yang mengandung nilai-nilai ilmu pengetahuan. Nilai dimaksud akan menjadi sarana sekaligus daya tarik edukasi, apabila diinterpretasikan (*story telling*) untuk dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) khususnya pengunjung atau wisatawan. Dengan pendekatan inilah pemahaman, apresiasi dan kepedulian tumbuh yang pada akhirnya memastikan keberlanjutan akan terjaga dengan baik (Fennel dan Smale, 1992).
4. Aspek Ekonomi Masyarakat. Pariwisata perdesaan merupakan konsep pembangunan yang dapat menjadi nilai tambah sumber pendapatan sekaligus pembiayaan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan budaya perdesaan yang unik. Mata rantai dari pariwisata, ekowisata dan wisata budaya sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, juga merupakan

salah satu alat yang dipercaya mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya lapangan kerja baru, sumber pendapatan bagi masyarakat, aktivitas jasa dan usaha yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi perdesaan, termasuk pada daerah-daerah sekitar yang belum berkembang dan tersentuh pembangunan (Fennell dan Smale 1992). Dari beberapa sumber hasil penelitian, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pariwisata di satu wilayah termasuk kawasan perdesaan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan setempat.

5. Aspek Rekreatif. Atmosfir lingkungan perdesaan yang tenang dan kehidupan keseharian masyarakatnya yang masih memegang teguh tradisi dan akar budayanya, memiliki daya tarik unik yang bersifat rekreatif bagi orang berkunjung untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan suasana perdesaan.

Kebijakan

Pembangunan pariwisata perdesaan perlu diperhatikan beberapa kebijakan yang perlu menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraannya.

Kegiatan pariwisata perdesaan di Indonesia mulai berkembang pada awal terjadinyakrisis ekonomi pada tahun 1997 Didorong karena banyaknya masyarakat perkotaan yang mengalami krisis jati diri. Tingginya apresiasi dan kepedulian terhadap nilai-nilai sosial dan rasa cinta tanah air yang pernah di anggap sebagai karakter bangsa Indonesia dan kekuatan pemersatu NKRI, sekarang ini semakin lemah dan cenderung tergantikan oleh nilai-nilai budaya luar terutama yang bersifat individualistis dan materialisme. Padahal secara geografis, keanekaragaman tradisi dan adat istiadat masyarakat yang tersebar di

Tabel 2. Kebijakan terkait dengan pariwisata perdesaan

INTERNASIONAL	NASIONAL	DAERAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. UNESCO: <ul style="list-style-type: none"> • Safeguarding Traditional and Popular Culture of 1989 dan 2003 • UNWTO 1999, kesepakatan mempromosikan pelestarian warisan budaya melalui pariwisata berkelanjutan. • Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, • UNESCO Convention on Culture Tourism 2. World Summit 1992 dan 2002 tentang Pembangunan berkelanjutan 3. Charter For Pariwisata berkelanjutan 1995 4. The Hue Declaration on Cultural Tourism and Poverty Alleviation 2004; 5. ICOMOS 1999 International Cultural Tourism Charter 6. WTO Tourism Code Of Conduct 7. Deklarasi Yogyakarta tentang pariwisata budaya dan pemberdayaan masyarakat, 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 • UU No 10 Th. 2009 tentang Kepariwisataaan • UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. • UU No. 11 Th. 2010 tentang Cagar Budaya • UU No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU No 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU No 6 Th. 2014 tentang Desa • PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa • PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa • Instruksi Presiden RI No. 16 Th. 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata • PP Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional tahun 2010 – 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Desa dan Desa Adat • Pengusahaan Pariwisata • Investasi • Lembaga Pengelola 2. RIPPDA 3. Adat Istiadat dan Kearifan Lokal 4. Lisensi Masyarakat Lokal

Sumber: Ardiwidjaja 2006.

perdesaan mampu menjadi landasan strategi bagaimana mengatasi krisis dan membangun kebudayaan sebagai karakter dan identitas nasional ke depan. Oleh karena itu perlu upaya terus menerus membangun dan memperkuat kehidupan bangsa, dimulai dengan melindungi dan melestarikan keanekaragaman nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat di perdesaan yang masih mencerminkan ke Indonesiaian. Namun sayangnya dalam menanggapi pariwisata perdesaan yang diharapkan mampu menghilangkan krisis jati diri sangat lambat.

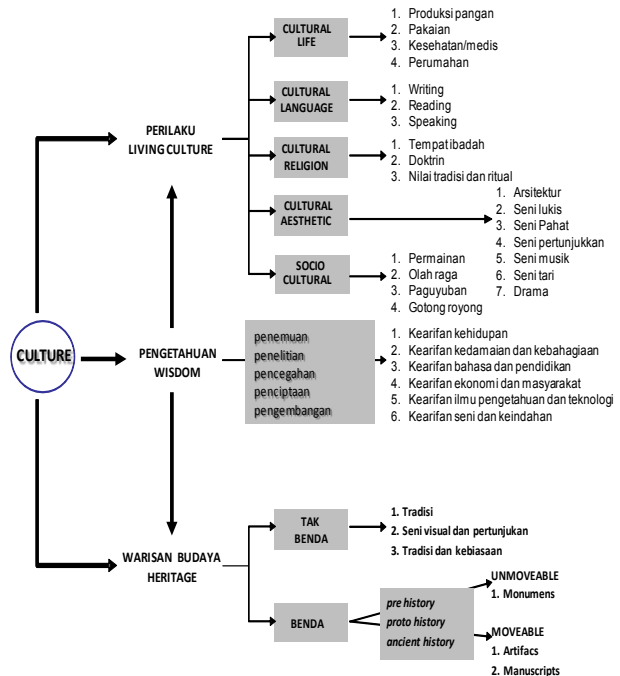
Sedangkan pembangunan di bidang pariwisata, hingga saat ini belum berjalan sesuai dengan esensi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Harus diakui bahwa pengembangan pariwisata di banyak daerah di Indonesia, umumnya masih belum menjadi prioritas utama. Pendekatan konsep pariwisata di banyak daerah belum ditempatkan sebagai alat percepatan pembangunan, namun ditempatkan sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi tanpa dibarengi kebijakan-kebijakan

yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberkelanjutan. Sebagai contoh konsep desa wisata yang banyak dikembangkan di daerah-daerah. Namun sayangnya desa wisata yang merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku, banyak dikembangkan dengan tidak memperhatikan terlebih dahulu pada keunikan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga sering desa wisata lebih menitikberatkan pada keindahan panorama alam, keunikan flora-fauna, di banding dengan kegiatan pertanian/perikanan, seni budaya dan keterampilan, dan daya tarik lain yang berbasis budaya masyarakat setempat.

Contoh ini jelas menunjukkan bahwa esensi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang seharusnya menjadi alat pelestarian lingkungan keanekaragaman sumber daya budaya dan alam, serta kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis kerakyatan, malah menjadi senjata yang cenderung menghancurkan tatanan lingkungan dan kehidupan sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, dan bahkan melemahkan ideologi, karakter dan identitas sebagai bangsa Indonesia.

Kondisi sekarang beberapa tour operator sudah mulai melihat peluang mengembangkan atraksi tradisional dengan keunikan kedaerahan di desa, yang mampu memberikan nilai kepuasan pengalaman dan pengetahuan kepada wisatawan. Page dan Getz (1997) mengungkapkan bahwa pada dasarnya motivasi utama wisatawan yang ingin menikmati pariwisata perdesaan adalah adanya kontak atau interaksi dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya di lingkungan perdesaan. Dipastikan produk wisata perdesaan akan mampu menjadi bukti keberadaan aset

keanekaragaman daya tarik alam dan budaya ke Indonesian yang unik dan otentik, terutama pada unsur-unsur dari akar budaya masyarakat perdesaan yang berbasis budaya agraris dan bahari (Ardiwidjaja, 2013a).



Gambar 2. Unsur-unsur Sistem Kebudayaan

Sumber: *Cultural System for Quality Management, 1999, Modified.*

Atas dasar hal tersebut, seyogyanya pembangunan pariwisata perdesaan di Indonesia di posisikan sebagai alat mewujudkan percepatan pembangunan nasional yang *accepted socially, culturally appropriate, indiscriminative, people centered (pro-poor, job, growth), dan environmentally sound.* Artinya pariwisata perdesaan sangat mungkin dikembangkan atas dasar daya tarik unsur-unsur dalam sistem kebudayaan yang merupakan akar budaya keseharian masyarakat perdesaan kecuali unsur religi.

Faktor penting yang perlu dilakukan adalah memperoleh izin (*local lisenca*) unsur-unsur mana yang menjai akar budaya keseharian dari sistem kebudayaan masyarakat perdesaan diperbolehkan untuk memanfaatkan dan

dikemas sebagai daya tarik produk wisata perdesaan (Lord, 2003).

Beberapa produk wisata perdesaan yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain:

1. Daya tarik pertanian, perkebunan, peternakan dan nelayan. Dikemas sebagai paket wisata yang menawarkan pengalaman dan pengetahuan pola dan proses pertanian meliputi juga kegiatan perkebunan, hortikultura, perikanan maupun kehutanan dari masyarakat setempat. Aktivitas dapat dilakukan dengan cara melihat maupun melakukan langsung cara menyemai benih padi, memanen padi, membajak sawah dengan kerbau dan kegiatan lainnya.
2. Daya tarik tradisi perawatan kesehatan dan kecantikan. Dikemas sebagai paket wisata yang menawarkan pengalaman dan pengetahuan tradisi perawatan kesehatan, pengobatan dan kecantikan yang dilakukan turun temurun dengan menggunakan ramuan tradisional disamping sumber alam lainnya seperti sumber air panas dan sebagainya.
3. Daya tarik kearifan lokal. Dikemas sebagai paket wisata yang menawarkan pengetahuan terkait kearifan lokal masyarakat desa memaknai dan beradaptasi dengan lingkungan alam sekitarnya sebagai sumber kehidupan dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan secara berkelanjutan.
4. Daya tarik kesenian. Dikemas sebagai paket wisata yang menawarkan pengalaman dan pengetahuan tentang manifestasi kreatifitas masyarakat desa yang diekspresikan dalam berbagai bentuk seni dan kerajinan. Bentuk tersebut misalnya seni musik, tari, seni pahat, seni lukis hingga seni bela diri, serta kerajinan menganyam, menenun dan membuat alat-alat rumah tangga.
5. Daya tarik benda warisan budaya. Dikemas sebagai paket wisata yang menawarkan

pengalaman dan pengetahuan tentang daya tarik pelestarian nilai-nilai kesejarahan dan kebudayaan yang mencerminkan peradaban masyarakat desa. Asal-muasal terbentuknya perdesaan tersebut baik dalam bentuk peninggalan berupa situs, artefak, maupun manuskrip.

Sarana dan Fasilitas

Dalam upaya menghindari dampak lebih besar terhadap lingkungan pedesaan, pedusunan atau pedalaman (*rural area*) di kawasan Perdesaan, model pengembangan yang harus diterapkan dalam penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas wisata adalah membatasi bangunan baru dengan memanfaatkan secara optimal sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang sudah ada dan ramah lingkungan. Tidak harus banyak dari sisi jumlah, tetapi lengkap dan memadai. Misalnya memprioritaskan pada ciri kelokalan dan skala industri kecil melalui keterlibatan masyarakat untuk penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang meliputi:

1. fasilitas akomodasi bernuansa perdesaan ataupun *homestay* di rumah penduduk setempat,
2. ruang Serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti tempat pelatihan, peragaan dan pertunjukan kebudayaan tradisional dan sebagainya
3. Pasar tradisional seni dan kerajinan, yang ditempatkan pada ruang terbuka.
4. Pusat Layanan informasi dan Paket wisata terpadu, yang memberikan layanan paket-paket wisata perdesaan di dalam maupun di luar kawasan kawasan yang mencakup agrowisata, wisata kesehatan dan kecantikan, Wisata lingkungan alami, serta wisata kuliner

PENUTUP

Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan

yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari perjalanan Republik Indonesia sendiri. Istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Dari pendapat para ahli, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, dan hukum yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri dengan corak kehidupan didasarkan pada hubungan masyarakat yang diikat oleh adat istiadat yang ketat. Masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang masih tetap mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka yang terikat pada lokalitas serta kekuatan pondasi adat dan tradisi budayanya baik yang bersifat agraris maupun bahari.

Sekarang ini perdesaan telah berkembang kegiatannya, tidak hanya mengandalkan pertanian sebagai aktivitas perekonomian utamanya saja, tetapi juga pariwisata. Kawasan perdesaan dapat mengembangkan aktivitasnya dengan tetap menggunakan sumber daya lokal yang ada dan menjadi keunikan atau kekhasan daerah dengan mengembangkannya menjadi kegiatan pariwisata, kegiatan ini sebagai satu perkembangan baru pembangunan kawasan perdesaan yang disebut dengan pariwisata perdesaan. Pariwisata perdesaan memungkinkan masyarakatnya mempunyai kegiatan tambahan yang bila dikelola dengan baik akan menjadi sebuah potensi yang berdampak baik bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat desa.

Pariwisata perdesaan adalah kegiatan yang multikompleks; bukan hanya pariwisata yang berbasis pertanian. Tetapi bisa juga yang berhubungan alam sekitar dengan daya tarik petualangan, olahraga, kesehatan, berburu

sejarah dan keurbakalaan, pendidikan, dan keanekaragaman kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Persyaratan utama adalah kegiatan yang mampu memberikan kedamaian, ketenangan, dan relaksasi di lingkungan perdesaan. Dengan menerapkan konsep wisata budaya dan ekowisata (*eco-culture tourism*), pembangunan pariwisata di kawasan perdesaan akan dapat memacu percepatan pembangunan nasional yang dimulai dari pinggir.

Atas dasar uraian sebelumnya, maka dapat dibangun beberapa rekomendasi dalam mengembangkan wisata perdesaan antara lain:

1. Melibatkan pada seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pariwisata perdesaan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. Membangun dan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan penghargaan dari *stakeholder* melalui proses interpretasi lingkungan alam dan budaya local yang lengkap dan asli.
 - b. Menguatkan masyarakat setempat dalam menciptakan daya tarik dan atraksi guna memperkenalkan alam dan budaya setempat sebagai asset yang dapat meningkatkan proses pelestarian dan peluang ekonomi.
 - c. Mendorong partisipasi proaktif dan keterlibatan para pelaku di setiap level pada proses pengembangan pariwisata.
 - d. Mendorong sektor formal dan informal dalam membangun kelembagaan terpadu yang bertujuan mengembangkan pemasaran melalui promosi dan kampanye lingkungan, menguatkan SDM, dan memfasilitasi kegiatan pendampingan.
2. Mengkajidaya dukung dan daya tampung lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat perdesaan terhadap dampak penyelenggaraan pariwisata. Daya dukung

pariwisata bukan merupakan angka absolute, tapi sebuah rentang nilai yang berhubungan dengan tujuan pengelolaan di sebuah daerah tujuan yang bersifat unik. Pendekatan daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*) berupaya untuk membangun pemahaman terhadap dampak yang berhubungan dengan karakteristik wisata yang meliputi jenis daya tarik dan atraksi, jumlah pengunjung, kepemilikan, tarip hingga fasilitas dan sarana. Dengan demikian maka batas-batas yang mampu diterima oleh lingkungan sosial dan budaya setempat dapat diketahui dengan benar.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu maka proses pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan pariwisata sangat perlu dirumuskan secara efektif dan terpadu untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Materi yang perlu disampaikan dalam peningkatan SDM ini adalah pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan wisata budaya dan ekowisata dengan menanamkan kerangka pikir bahwa pengembangan tersebut tidak semata-mata untuk meningkatkan lapangan kerja, kesempatan usaha serta perolehan devisa. Lebih penting lagi, adalah mewujudkan pengetahuan dan pemahaman aspek pelestarian dan multikultural yang memperkuat ketahanan dan kesatuan bangsa.
4. Memperkuat promosi bertanggung jawab yang basisnya adalah mengedukasi dan memprovokasi terhadap pelestarian. Promosi yang ditujukan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan, dan mengampanyekan aspek konservasi, restorasi, rekonstruksi nilai-nilai lingkungan alam dan budaya, diharapkan dapat meningkatkan dan mewujudkan kesadaran dalam memperkuat upaya pelestarian. Promosi semacam ini juga diharapkan bisa mengurangi benturan kepentingan antar-*stakeholder* terhadap prinsip multikultural dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata.
5. Meningkatkan kegiatan pengendalian yang terpadu dan berkelanjutan bersama masyarakat setempat. Pemantauan dan evaluasi diarahkan untuk mengawasi penyelenggaraan pariwisata tetap mengacu pada prinsip yang ada serta dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Penyelenggaraan pariwisata bisa berhasil jika proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh *stakeholder* dengan cara partisipatif yang melibatkan seluruh pihak. Pemantauan dan evaluasi juga harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkatan implementasi, serta menggunakan alat ukur yang meliputi pembatasan jumlah pengunjung dan aktivitas, kelestarian lingkungan sosial dan budaya, penguatan kondisi sosial-budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Menciptakan produk wisata pedesaan yang dikemas sedemikian rupa dengan mempertimbangkan arah pengembangan produk wisata pedesaan berbasis potensi sumber daya tarik lingkungan alam alami yang dapat dikelompokkan menjadi daya tarik bentang alam, gejala alam dan flora fauna endemik. Serta budaya yang otentik yang dikelompokkan menjadi daya tarik tradisi, pola kehidupan keseharian sosial serta benda warisan budaya masyarakat pedesaan. Proses pengemasan dikembangkan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat lokal dengan tidak bertentangan terhadap tatanan dan nilai-nilai budaya masyarakat pedesaan, mengacu pada upaya pelestarian kawasan pedesaan dan lingkungan sekitarnya, memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, maupun sosial dan budaya, serta memberikan peluang sebesar mungkin kepada masyarakat lokal untuk menjadi pengelola, dan meningkatkan kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwidjaja, Roby, 2013. *Pariwisata Berkelanjutan: Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis Lingkungan*. Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
- Ardiwidjaja, Roby, 2013a. *Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: P3K Sebagai Destinasi Wisata Berbasis Bahari*. Penerbit Kepel Press, Percetakan Amara Books. Ringroad Utara, Yogyakarta.
- Arndt(dalam Arif R, 2012) Sosiologi Pertanian - Masyarakat Pedesaan di Indonesia (<http://radyckal.blogspot.com/2012/03/sosiologi-pertanian-masyarakat-pedesaan.html>). Diunduh tanggal 1 Maret 2014.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2011. *Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia; Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
- Biro Pusat Statistik, 2012. Jumlah penduduk miskin berdasarkan propinsi, (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=23¬ab=1). Diunduh tanggal 1 Maret 2014.
- Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert and Stephen Wanhill, 1996. *Tourism Principles and Practice*. Longman Group Limited, Malaysia.
- Cooper, Chris. 2012. *Essentials of Tourism*. Pearson: New York.
- Eurostat. 1998. *Community Methodology on Tourism Statistics*. European Commission. Luxembourg.
- Fennell, D.A. dan Smale, B.J.A. 1992. "Ecotourism and Natural Resource Protection: Implications of an Alternative Form of Tourism for Host Nations" *Tourism Recreational Research* Vol. 17 No. 1.
- Frochot. 2005. A benefit segmentation of tourist in rural areas: a schottish perspectives, *Tourism Management* vol.26, Grasindo.
- Gunn, Clare, 2nd ed, 1998. *Tourism Planning*, Taylor and Francis, New York, USA.
- Hall, Colin Michael. 2003. *Introduction to Tourism*. Hospitality Press: Australia.
- Fidriansyah, 2011. *Geostrategi Indonesia*. <http://fidri-bitelsyah.blogspot.com/2011/06/geostrategi-indonesia.html>. Diunduh Senin, 5/7/2014.
- Myteiku, 2010. *Geostrategi Indonesia*. <http://myteiku.blogspot.com/2010/04/geostrategi-indonesia.html>. Diunduh Minggu, 4/7/2014.
- Darisandi Roby. 33 *Kebudayaan diklaim Negara Asing ! Segera Patenkan Aneka Ragam Kebudayaan Indonesia*. <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-33-kebudayaan-diklaim-negara-asing-segera-patenkan-aneka-ragam-kebudayaan-indonesia> Diunduh Februari 2015.
- Inskeep. Edward, 1991. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*, Van Nostrand Reinhold, New York, USA.
- John Naisbitt 1995 *Global paradox: The Bigger the World Economy, The More Powerful its Smallest Players*. New York: William Morrow and Company.

- Juho Pesonen, Tommi Laukkanen and Raija Komppula, 2011. Benefit segmentation of potential wellbeing tourists. *Journal of Vacation Marketing* 17(4) 303–314.
- Koentjaraningrat, 1977. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lord, 2003. Cultural Planning and Management, *Knoxville Cultural Heritage Tourism Initiative Phase 1 Report*, East Tennessee.
- Luigi Cabrini, 2004. Trend of International Tourism, 13th Central European Trade Fair, WTO.
- MacKinnon, J. K. MacKinnon, G. Child & J. Thorsell. 1990. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Gadjah Mada Press. Jogjakarta.
- Mill, R. C. dan Morrison, Alastair. M. 2012. *The tourism sistem*. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing.
- Page dan Getz. 1997. *Bisnis Pariwisata Perdesaan, Perspektif Internasional (terjemahan oleh Bagian Proyek Pengembangan Literatur Pariwisata Jakarta)*, UK.
- Ruskhan Abdul Gaffar, 2007. Pemanfaatan Keberagaman Budaya Indonesia dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur asing. Makalah yang disajikan dalam Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia Pertemuan Asosiasi Jepang-Indonesia di Nanzan Gakuen Training Center, Nagoya, Jepang, 10—11 November 2007.
- Sheila A McKenna, Gerarld R Allen dan Suer Suryadi (Eds), 2002. *A Marine Rapid Assesment of The Kawasan perdesaan Island, Papua Province, Indonesia*. *RAP Bulletin on Biological Assesment twenty two*, CI.
- Swarbrooke. John, 1995. *The Development & Management of Visitor Attraction*, Butterworth-Heinemann, Oxford.
- Tempo. 72 Ribu Desa di Indonesia Miskin. <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/173438370/>, diakses 22 Juni 2013). Diunduh tanggal 1 Maret 2014.
- The Fine Art Department of Thailand, 1999, *Cultural System: For Quality Management*, Bangkok, Thailand.
- Tirta. Rural Poverty in Indonesia. (<http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/indonesia>, diakses 22 Juni 2013). Diunduh tanggal 1 Maret 2014.
- WTO, 2006. *International Tourism*, UNWTO World Tourism Barometer, V0l. 4, Jan 2006.